



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang- pasangan, yaitu ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita.¹ sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.² Tujuan diciptakan berpasang- pasangan agar makhluk hidup dapat terus berkembang biak dan melestarikan keturunannya melalui proses perkawinan.

Sesuai Firman Allah SWT di dalam QS. Ar-Ruum/30: 21



Artinya: “Dan di antara tanda- tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Ruum: 21)

Perkawinn merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki- laki

¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan* , (Bandung: Al-Bayan, 1995), cet ke- 2, h. 11

² Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), cet ke-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan perempuan yang terlembaga dalam suatu institusi yang kokoh yang dikui secara agama maupun hukum, Al- Qur'an secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang- pasangan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tenteram, berkaitan dengan itu perkawinan juga disebutkan dengan suatu ikatan yang kokoh (*Mitsaqan Ghalidzhan*).³

Nikah merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, karena merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami isteri mendidik dan membesarkan dalam sebuah rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan.⁴

Dalam ilmu fiqh, perkawinan didefinisikan sebagai *aqad* yang menghalalkan pergaulan (seksual) ⁵ dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong- menolong antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Perkawinan juga disebut dengan “Pernikahan”, berasal dari kata *Nikah* () yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wath'i*).⁸ Kata “*Nikah*” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan

³ Jurnal Penelitian Keislaman, *Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram*, vol.10 No. 1 Januari 2014, (Mataram, IAIN:2 014), h. 130

⁴ Jurnal Hukum Islam, *Pemikiran Hukum Islam dalam perspektif paradigma keilmuan*, (Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau: 2013), vol.13 no 1 2013, h. 86

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, (Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2005), h. 18

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-41, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 374.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,), Cet. III Ed. 2, h.456

⁸ Muhammad Bin Ismail Al- Kahlany, *Subul Al- Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), Jil.3, h.109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*coitus*), juga untuk arti akad Nikah.⁹

Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi umt manusia yang mempunyai tugas ke khlifahan untuk memakmurkan bumi.¹¹ Pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita mempunyai peranan sangat penting dalam pembentukan pribadi serta pembinaan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan norma- norma untuk mengatur perkawinan dengan segala aspeknya. Dengan demikian timbullah hukum yang mengatur hubungan suami isteri dalam satu keluarga dan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dirumuskan, bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (pasal 3). Guna merealisasi tujuan dimaksud, dibutuhkan rukun dan syarat- syarat tertentu. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan *ijab qabul*.¹² Oleh karena itu jika tidak ada salah satu dari rukun nikah diatas maka pernikahan dianggap tidak sah.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya

⁹ Wahbah Al- Zuhaily, *Al- Fiqh Al Islamy Wa adillatuh*, (Beirut: Darl Fikr, 1989), cet.3, h.29

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : Humaniora Utama Press,t.t.),h.18

¹¹ An. Nur Jurnal Studi Islam, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis terhadap pemikiran JIL, tentang pernikahan lintas agama) oleh Imam Mustofa*, terbit tanggal 3 september 2005, (Jogjakarta, Annur: 2005), h. 68

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 116-117



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹³ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki- laki¹⁴

Begitu pula dalam *Fiqh Sunnah* di sebutkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹⁵ Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

Peranan wali disinggung dalam Al- Qur'an antara lain pada QS. Al- Baqarah 232 di bawah ini:



Artinya: Apabila kamu mentalak isteri- isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al- Baqarah: 232).

Ayat diatas menyinggung peran wali dari para wanita yang hendak

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),. 96

¹⁴Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1007

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* 7, terj. Muhammad Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. 2, 1982), h, 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikahkan. Ayat ini sangat menjelaskan posisi dan kedudukan wali dalam pernikahan, sehingga kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah maka perkawinan tidak sah.

Tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan diridhai Allah SWT. Tujuan ini akan tercapai apabila calon- calon mempelai telah saling suka menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan pihak- pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri. Karena pihak wanita tidak secara langsung melaksanakan “*ijab*”, maka agama mengisyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya.¹⁶

Tujuan ditetapkan wali nikah sebagai rukun pernikahan adalah untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya, wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Dalam sebuah pernikahan seorang wanita harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orangtuanya yang bertindak sebagai wali nikahnya dan tidak semua wali setuju begitu saja dengan keinginan dari anak perempuannya,

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. III* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkadang menemui kendala yang tidak diinginkan, yakni walinya tidak menyetujui terhadap seorang pria yang menjadi pilihan wanita tersebut atau dalam istilah Islam disebut wali ‘*adhal*.

Wali ‘*adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing- masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.¹⁷ Disisi lain Wali ‘*adhal* diartikan sebagai wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki- laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.¹⁸

Mengenai keberadaan wali yang sedemikian penting itu Nabi Muhammad SAW melalui haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahamad dan At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة قالت: قال رسول الله ص.م أَيُّمَا مَرَأَتٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (متفق عليه)

Artinya: “Siapa saja perempuan yang nikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal”. (HR. Mutafaqun Alaih).¹⁹

Dari hadis di atas dapat dipahami ketika seseorang perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah dan wali nikah itu sendiri merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), cet.1, h. 1339

¹⁸ Ahrun Khoeruddin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1999), h. 47

¹⁹ Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, MA, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 2, h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sebuah pernikahan.

Imam Jalaluddin Al- Mahally didalam *Syarh Minhaj At -Thalibin* menerangkan bahwa:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمون الولي من تزوج بين يديه بعد امره به والمرأة والحاطب حاضران او تقام البينة عليه لتقرر او توارى بخلف فإذا حضر فإنه ان زوج فقد حصل الفرض والافعاصل

Artinya: “Di haruskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu ‘adhal adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata- nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan (yang menjadi maulanya) berikut laki- laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali ‘adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali ‘adhal”.²⁰

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa jika wali menolak untuk menikahkan anaknya maka hakimlah sebagai penggantinya dan dinyatakan sebagai wali yang “adhal, kemudian jika ia bersedia mengawinkan dengan penuh kesadaran maka wali tersebut tidak dinamakan dengan wali yang ‘adhal.

Adapun ketentuan wali nikah dalam pasal 6 Undang- undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.

²⁰ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin, Juz III*, (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974) , cet IV, h.225



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pasal 6 ayat 3: Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 dinyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal*. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²¹

Berdasarkan ketetapan hukum di atas dapatlah dipahami bahwa jika terjadi wali yang *'adhal* dari wali nasab, maka berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia penyelesaian sengketa pernikahan karena wali *'adhal* tersebut maka calon pengantin wanita harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama setelah itu pengadilan memberikan putusan bahwa walinya *'adhal* dan menunjuk hakim sebagai pengganti walinya dalam hal ini adalah kepala KUA Kecamatan yang bersangkutan berdomisili. Cara ini tentunya mempunyai dampak negatif bagi wanita, di samping proses pengadilan yang lama juga memakan banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Kasus pernikahan wali *'adhal* ini apabila tidak ditangani secara bijaksana, maka akan menimbulkan kesenjangan hubungan antara siperempuan dengan walinya,

²¹*Op- Cit*, Abdurrahman, h. 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga akan melibatkan keluarga besar didalamnya.

Bukan hanya itu, kasus wali '*adhal* yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahkan dampak yang sangat dikhawatirkan adalah ketika masa proses pengadilan yang sangat lama tersebut kemungkinan dari calon wanita dan pria tersebut melakukan tindak asusila, *kawin lari* bahkan berusaha melakukan nikah tanpa legalitas hukum, maupun melakukan hubungan biologis di luar nikah dengan harapan bahwa wali nikah mau memberikan restu karena wanita tersebut telah hamil. Disamping itu juga akan menimbulkan perselisihan antara anak dan orang tua, dimana orangtua enggan menikahkan anaknya, sementara diajarkan oleh agama "*Ridha Allah terletak pada ridha kedua orangtua dan murka Allah terletak pada murkanya orangtua*".

Oleh Karen itu sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat di bidang pernikahan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan jajarannya, diharapkan mampu mengatasi permasalahan sengketa pernikahan seperti wali ‘*adhal* ini, dengan cara memcarikan jalan keluar, memberikan nasehat dan menjadi mediator kepada pihak yang bersengketa, agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dan di carikan jalan keluarnya, sehingga wali mau untuk menikahkan dan tidak berlanjut kepengadilan agama untuk menetapkan walinya ‘*adhal* dan menunjuk hakim sebagai wali nikahnya.

Beranjak dari permasalahan diatas penulis merasa tertarik dan sangat prihatin dengan pandangan sebahagian masyarakat kita bahwa untuk mendapatkan restu menikah dari walinya sehingga melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Persoalan diatas terjadi di KUA Kecamatan Perhentian Raja sebanyak enam kasus dan kesemuanya berhasil diselesaikan dengan jalur mediator oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Perhentian Raja. Oleh karena itu penulis merasa perlu pemecahan masalah sengketa wali ‘*adhal* di tingkat KUA sebelum masalah tersebut sampai ke Pengadilan Agama yang memakan banyak waktu dan biaya serta Psikologis.

Berdasarkan fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Wali ‘Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Perhentian Raja”***.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Defenisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman maka terlebih dahulu dijelaskan maksud istilah dalam judul tersebut.

1. Eksistensi diartikan sebagai Keberadaan.²²
2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan, PPN dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.²³
3. Mediator adalah pihak netral yang membntu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanp menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁴
4. Wali '*adhal* adalah adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki- laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.²⁵

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan kepala Kantor Urusan

²² Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Pusat Bahasa Jakarta: 2008), h. 378

²³ Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, *Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji*, (Jakarta, Depag: 2005), ed. 2005, h. 563

²⁴ H. Soeharto, *Mediasi dan Perdamamaian*, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia: 2005, h. 89

²⁵ Ahrun Khoeruddin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1999), h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Kecamatan yang bertugas melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan, di samping itu juga diharapkan dapat memberikan solusi dan jalan keluar kepada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan seperti perselisihan antara seorang anak dan orang tua yang tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya yang disebut dengan wali '*adhal*'.

Apabila segketa wali *adhal* ini tidak dicarikan jalan keluarnya, maka dikhawatirkan perselisihan antara orang tua dan anak akan berkepanjangan, dan pada akhirnya akan berakhir di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan persoalan wali '*adhal* tersebut, tentunya dengan hal ini akan mempengaruhi psikologi dari pihak yang bersengketa, bahkan waktu yang lama maupun biaya yang banyak harus dikeluarkan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat diharapkan mampu memberikan solusi dan jalan keluar baik itu melalui bimbingan penasehatan dan bahkan melalui jalan mediasi dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertindak sebagai mediatornya.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh Karen itu penulis membatasi hanya berkaitan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian sengketa wali '*adhal* yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertindak sebagai mediator, dimana jumlah kasus wali '*adhal* yang terjadi yaitu sebanyak enam kasus.

3. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal* di KUA Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana kasus- kasus pernikahan wali '*adhal* dan cara penyelesaian sengketa pernikahan karena wali '*adhal* di KUA Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Analisis terhadap Eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal* di KUA Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari memberikan jawaban kenapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Bertitik tolak dari fokus penelitian yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal* di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUA Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kasus- kasus pernikahan wali '*adhal* dan cara penyelesaian sengketa pernikahan karena wali '*adhal* di KUA Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- c. Untuk mengetahui analisis terhadap eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adhal* di KUA Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan faedah bagi pihak- pihak, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

a. Manfaat Teoritis:

1. Untuk mencari dan mengumpulkan data- data kemudian dianalisis dan diolah serta ditelaah, untuk kemudian disusun dalam bentuk tesis.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang pernikahan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk mematangkan teori tentang penyelesaian sengketa wali '*adhal*

b. Manfaat Praktis:

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan sebagai pedoman bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatanlain dalam rangka mengoptimalkan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) khususnya dalam penyelesaian sengketa wali '*adhal*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian karya ilmiah sejenis lebih mendalam.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) UIN SUSKA RIAU

E. Tinjauan Penelitian yang Relevan.

Dari beberapa literatur yang berada diperpustakaan pascasarjana dan diperpustakaan umum, penulis hanya menemukan tesis yang membahas tentang wali ‘adhal yaitu dalam tesis yang ditulis oleh Yahdi Rauza NIM: 21293105250 dengan judul “Faktor- faktor kecendrungan terjadinya wali ‘*Adhal* di Kabupaten Kampar, tesis ini terbit pada tahun 2015 atau 1436 H. didalam tesis ini menerangkan bahwa dari beberapa kasus yang ditemukan dilapangan adapun faktor yang menyebabkan terjadinya wali ‘adhal adalah didominasi bahwa seorang wali nikah tidak bisa untuk mengucapkan lafadz ijab qabul, setelah diajarkan dan dilatih dalam pengucapannya namun wali nikah tersebut tetap tidak mampu untuk menlafazkan lafadz ijab dan qabul tersebut.

Sedangkan judul penelitian ini adalah “Eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali ‘*adhal* di KUA Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”, sejauh penulis ketahui belum ada yang meneliti mengenai penelitian yang penulis lakukan.